

**IMPLEMENTASI KONSEP *KALĀLAH* DALAM KEWARISAN
ISTRI PADA MASYARAKAT MUSLIM**

**(Studi di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung
Tengah)Kampung**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Syarat Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Strata (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

ANISAFITRI

NPM: 1621010044

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

**IMPLEMENTASI KONSEP *KALĀLAH* DALAM KEWARISAN
ISTRI PADA MASYARAKAT MUSLIM**

**(Studi di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)Kampung**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Syarat Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Strata (S1)**

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ANISAFITRI

NPM: 1621010044

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban, dalam proses pembagian waris Islam terdapat ketentuan yang berlaku seperti kepastian meninggalnya seseorang, ahli waris, dan harta waris. Bagian yang akan didapat oleh ahli waris telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pelaksanaan pembagian waris *kalālah* dalam kewarisan istri pada masyarakat muslim di Kampung Bangunrejo yaitu seorang istri yang ditinggal oleh suaminya dan tidak mempunyai keturunan serta tidak mendapat harta waris yang sesuai dengan ketentuan kadar hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konsep *kalālah* dalam kewarisan istri pada masyarakat muslim di Kampung Bangunrejo dan faktor-faktor yang menjadi perbedaan pembagian waris istri di Kampung Bangunrejo. Adapun tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui Implementasi Konsep *kalālah* dalam kewarisan Istri di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo dan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sistem *kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 20 orang yang menjadi responden pada masyarakat muslim di Bangunrejo. Kemudian data yang telah terkumpul diolah melalui proses *editing*, dan sistematis sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam masyarakat Kampung Bangunrejo melakukan pembagian harta waris kepada ahli waris dengan cara yang berbeda-beda, ada yang menggunakan cara pembagian waris dengan hukum Islam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan ada pula yang menggunakan pembagian harta waris dengan jalan musyawarah dan pelaksanaan pembagian waris *kalālah* menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan *farā'idh* dan sebagian dengan musyawarah sesuai dengan kesepatan antar ahli waris. Faktor yang menyebabkan perbedaan dalam pembagian waris di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo adalah adanya keinginan mendapatkan harta waris yang lebih banyak dari yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisafitri

NPM : 1621010044

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Konsep *Kalalah* Dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim (Studi di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juli 2020

Penulis



Anisafitri
NPM. 1621010044



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Kalalah* Dalam Kewarisan Istri
pada Masyarakat Muslim (Studi di Kampung Bangun
Rejo Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah)**

**Nama : Anisafitri
NPM : 1621010044
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dsr. H. Mundzir HZ., M.Ag.
NIP. 195607271988031001**

**Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A
NIP. 198206262009011015**

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Konsep *Kalalah* Dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim (Studi di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah)"** disusun oleh Anisafitri, NPM: 1621010044, Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)

Sekretaris : Hasanudin Muhammad, M.H. (.....)

Penguji I : Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ.,M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. (.....)

Mengetahui
Dekan fakultas Syariah



M. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari yang ditinggalkannya.” (QS. an-Nisa [4]: 176)



PERSEMBAHAN

Dengan cinta, kasih, sayang dan rasa hormat saya persembahkan karya skripsi sederhana ini kepada :

1. Kupersembahkan karya ini dengan rasa hormat dan terimakasih kepada keluargaku tercinta, Ayahandaku Yatin dan Ibundaku Asmanah yang tidak pernah lelah mendukung dan memberi nasihat padaku.
2. Kakakku Miftahul Huda serta kakak iparku Ika Febrianti, kakakku Firman Syah Roni, adikku Zaskia Silviana, adikku Ahmad Fardan dan adikku Ahmad Atta Bahrudin Amin yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan semangat dan doa yang selalu menemaniku di setiap langkahku.
3. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. yang selalu menjadi panutan bagi saya, serta berkat masukan judul dari beliau saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
4. Sammenetim laki-laki yang tidak pernah lelah membantu serta memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah Universita Islam Negeri Raden intan lampung..

RIWAYAT HIDUP

Anisafitri lahir dengan selamat di Desa Sidoluhur Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah pada tanggal 08 Desember 1998, anak ke-3 dari enam bersudara, buah hati dari pasangan Bapak Yatin dan Ibu Asmanah.

Pendidikan dimulai pada tahun 2004 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangun Rejo dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif 10 Bangun Rejo selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bangun Rejo selesai pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2016/2017.

Bandar Lampung, 1 Juli 2020

Yang membuat

Anisafitri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahin

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Konsep *Kalālah* Dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim (Studi di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah)” dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.

3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H. Ketua Jurusan dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. Mundzir HZ., M.Ag Pembimbing I yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A Pembimbing II yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa yang sedang menempuh proses penyelesaian skripsi. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Bandar lampung, 24 Febuari 2020

Penulis,

ANISAFITRI
NPM. 1621010044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikansi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Islam	17
1. Pengertian <i>Kalālah</i>	17
2. Pengertian Kewarisan	19
3. <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Islam	34
B. Hukum <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Istri	39
1. Pengertian Waris Istri	39
2. Dasar Hukum <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Istri	42
3. Sistem <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Istri.....	44
C. Kajian Terdahulu/Kajian yang Relevan	48

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Lokasi Geografis Penelitian di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo.....	50
B. Kewarisan Menurut Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Tentang	57
C. <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Tentang	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo.....	68
B. Implementasi Konsep <i>Kalālah</i> dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar mempermudah pemahaman tentang judul skripsi dan tidak menimbulkan kesalah pahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI KONSEP *KALĀLAH* DALAM KEWARISAN ISTRI PADA MASYARAKAT MUSLIM”**, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *implementation* artinya pelaksanaan.¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya penerapan, pelaksanaan.
2. Konsep *kalālah*, Konsep adalah rancangan atau ide yang diabstrakan dari peristiwa konkret,² sedang *kalālah* secara ringkas diartikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan ayah.³ Maka konsep *kalālah* adalah rancangan atau ide dalam peristiwa seorang yang tidak mempunyai anak dan ayah.

¹ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 313.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 867.

³ Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, (Depok: Gema Insani, 2017), h. 501.

3. Kewarisan adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena sebab kematian pewaris.⁴
4. Masyarakat adalah Kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat yang menunjukkan adanya pemilikan atas norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat lapisan atau lingkungan sosial. Dalam kamus umum bahasa Indonesia masyarakat adalah pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan yang tertentu.⁵

Jadi secara menyeluruh yang dimaksud oleh judul ini adalah untuk memahami dan mempelajari secara keseluruhan tentang Implementasi Konsep *kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini dengan banyak pertimbangan dan bahan untuk penelitian yang tersedia, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif
 - a. Adanya kasus pembagian waris istri yang tidak mempunyai keturunan dilapangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h.194.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 1976) h. 175

- b. Timbulnya pertanyaan akan konsep *kalālah* dalam kewarisan istri yang terjadi di lapangan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Konsep *kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo.

2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu dalam Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.
- b. Adanya dukungan dalam penulisan skripsi ini seperti tersedianya sumber dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.
- c. Lokasi penelitian yang juga tidak jauh dari kediaman penulis sehingga memudahkan proses pengumpulan data.

C. Latar Belakang Masalah

Kalālah adalah bentuk masdar dari kata “*Kalala*” yang secara etimologi berarti letih atau lemah. Kata *kalālah* pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada suatu yang melingkarinya serta tidak berujung ke atas dan ke bawah, seperti kata “*Iklil*” yang berarti mahkota karena ia melingkari kepala. Seorang dapat dikatakan *Kalalah* manakala ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur (anak dan ayah). Kerabat dari sisi tersebut adalah *kalālah* karena berada disekelilingnya, bukan di atas atau dibawah.⁶ Kemudian kata *kalālah* digunakan untuk seorang yang tidak mempunyai ayah dan anak.⁷ *kalālah* juga

⁶ Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1959), h. 201.

⁷ Al-Alusi al-Albaghdadi, *Ruh al-Ma'ani*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), Jilid II, h. 448.

diartikan pula sebagai seorang yang lemah, kelemahan ini terlihat karena tidak adanya perlindungan seorang ayah ketika masih kecil dan tidak adanya perlindungan seorang anak ketika orang tua telah menua.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, melengkapi keanekaragaman sistem kewarisan adat di Indonesia dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi sistem hukum waris yaitu hukum waris berat peninggalan zaman hindia belanda yang bersumber dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an.⁸

Kewarisan adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris yang berdasarkan dengan asas-asas kewarisan yaitu, asas *Ijbari* (otomatis), asas *Bilateral*, asas *Individual*, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.⁹ Harta warisan adalah hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang dan wasiat.¹⁰ Waris berasal dari bahasa Arab *al-Mirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*, *al-Mirats* menurut istilah para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta tanah atau

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung : Rafika Adi Tama, 2007) h.1.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008) h. 16.

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹¹ Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggaldunia kepada ahli warisnya. Dalam Istilah lain Moh. Rifa'I Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *farā'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹² Kata hukum di awal kata hukum kewarisan Islam mengandung seperangkat aturan yang mengikat dan kata Islam dibelakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan. Dengan demikian berdasarkan wahyu Allah dan sunnah nabi tentang hak ihkwal peralihan harta atau diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³

Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farā'id*, *fiqh mawāris*, dan Hukum *al-mawāris*.¹⁴ Menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada oranglain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dalam kamus istilah *Fiqh farā'idh* adalah ilmu yang membicarakan cara membagi harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya karena sebab keturunan, perkawinan, dan Islam.¹⁵ Sedangkan secara bahasa waris memiliki beberapa pengertian yaitu mengganti, kedudukan,

¹¹ Habiburrahman *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 17.

¹² Tengku Muhammad Habsi ash-Shiddiqeqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 5.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 6.

¹⁴ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) h. 74.

¹⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33.

menganugraahkan, ataupun mewarisi. Sedangkan secara istilah, warisan berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁶ Harta warisan dalam Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pembagian untuk kerabat.¹⁷ Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁸

Pembagian waris lebih diutamakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris, Karena hubungan darah dapat menyebabkan terjadinya waris mewarisi.¹⁹ Akan tetapi tidak hanya hubungan nasab seseorang disebut ahli waris atau orang yang mendapat warisan, ikatan perkawinan juga menyebabkan hak waris. Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fukaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan

¹⁶ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), h. 335.

¹⁷ Muhammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yama Widya, 2013) h.11.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 4.

¹⁹ A. Assaad Yunus. *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, (Jakarta: PT. al-Qushwa, 1992) h. 25..

(misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya). Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dari sederetan hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan.

Ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢ ﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".²⁰

Dari ayat di atas dipahami bahwa antara suami istri itu saling mewarisi, dan seorang istri yang tidak mempunyai keturunan mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggal suami. Setiap perkawinan dapat menyebabkan kewarisan karena bukan hanya dua hati yang bersatu tetapi juga harta kekayaan mereka. Keluarga yang menjalani hidup susah senang bersama dalam rumah tangga dan segala kebutuhan hidup serta mempunyai keturunan. Semuanya akan ditanggung dengan harta bawaan yang kemudian bercampur antara harta suami dan istri. Setelah salah satu dari pasangan meninggal akan menyebabkan waris yang kemudian dibagi untuk masing-masing ahli waris. Dalam masalah kewarisan istri maupun suami dapat saling mewarisi. Penduduk Kampung Bangunrejo pada umumnya beragama Islam, hanya ada beberapa yang beragama non muslim seperti Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Perbedaan ini disebabkan karena desa Bangunrejo adalah tempat yang banyak dihuni oleh imigran dari kota-kota lain.

Pembagian waris di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tidak semua kalangan masyarakat menggunakan pembagian waris Islam dan sebagian masyarakat membagi warisnya dengan menggunakan hukum waris adat. Pembagian waris Adat serta dengan musyawarah antar ahli waris dilakukan dengan cara bagian ditentukan oleh ahli waris. Selain itu dalam pembagian waris musyawarah juga akan menghadirkan orang-orang selain ahli waris yang akan menjadi saksi bahwa telah

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Penerbit Dipnegoro, 2012), h.79.

dilaksanakan pembagian harta waris. Meskipun hukum Islam telah mengatur ketentuan pembagian harta waris secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris dalam pembagian harta waris tetap saja dalam prakteknya beberapa masyarakat enggan menggunakannya. Sehingga dalam pembagian waris seorang istri yang *kalālah* tidak semua mendapatkan seluruh hak yang seharusnya didapat. Contohnya ibu Tukinem yang setelah menikah dengan almarhum bapak Paiman dan tinggal bersama orangtua bapak paiman bersama para iparnya, ketika bapak paiman meninggal dunia ibu Tukinem tidak mendapat waris sama sekali serta dengan ikhlas meninggalkan rumah dan harta peninggalan almarhum bapak Paiman karena memang harta yang ditinggalkannya pun hanya sedikit. Contoh berikutnya ibu Ponirah istri almarhum bapak Jiwo, ketika bapak jiwo ibu ponirah mendapatkan harta waris sesuai dengan hukum Islam tetapi tidak mendapatkan bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KONSEP *KALĀLAH* DALAM KEWARISAN ISTRI PADA MASYARAKAT MUSLIM” (Studi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).**

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui Implementasi Konsep *Kalālah* dalam Kewarisan Istri pada masyarakat muslim

di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo. Sehingga dapat mempelajari kajian Islam dalam masyarakat serta mendapat pengetahuan baru untuk menjadi tauladan dalam kehidupan.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Konsep *Kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo?
2. Faktor-faktor yang menjadi perbedaan pembagian waris istri di Kampung Bangunrejo?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini penulis memiliki 2 (dua) tujuan utama yang akan dicapai dalam karya ilmiahnya.

1. Untuk mengetahui Implementasi Konsep *kalālah* dalam kewarisan Istri di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sistem *kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim (Studi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah).

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini yang utama adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta para pembaca skripsi ini tentang Implementasi Konsep *kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim dan sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian Ilmiah yaitu suatu penyelidikan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat kejadian atau keadaan dengan maksud untuk menemukan faham-faham baru dalam mengembangkan metode-metode baru.²¹

Penelitian ini penulisan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis.²² Penelitian ini bermaksud memahami tentang subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainya, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.²³ Adapun penjelasan lebih lanjut dalam penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

²¹ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009) hal. 3.

²² Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990) h. 139.

²³ Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) h. 6.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.²⁴ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Masyarakat di Desa Bangunrejo.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dan subjektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁵ Penelitian deskriptif adalah suatu cara untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁶

2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

²⁵ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fisafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) h. 54.

pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan yang dapat mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature tentang hukum waris Islam, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan, buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu maupun dari pihak lainnya.²⁷ Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapat data hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Masyarakat Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, objektif dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

b. Interview

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsets, 2009) h. 36.

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁸ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Masyarakat Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo. Pelaksanaan wawancara dengan Masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Konsep *Kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, buku, surat kabar, majalah, Undang-Undang dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang menjadi objek penelitian.³⁰ Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kampung Bangunrejo

²⁸ Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cet-10, 1997) h. 23.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bhakti, 2004), h.134.

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 2194 jiwa dan akan di pilih sebagai nara sumber untuk menjadi sampel.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data yang diambil, dari 15 orang yang diwawancarai hanya ada 3 orang yang akan menjadi sampelnya. Dalam hal menentukan sampel ini, menggunakan jenis *purposive sampling*, yaitu memilih berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi pada masyarakat Kampung Bangunrejo. Dengan kata lain, unit sampel yang dipilih disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang akan dianggap dapat mewakili populasi.³¹ yaitu Implementasi Konsep *Kalālah* dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yang mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 91.

mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen *interview* apakah sudah lengkap, relevan, jelas, dan tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

- b. *Sistemazing* atau sistematis, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat interpresentasikan temuannya kepada orang lain. Sedangkan metode berpikir yang digunakan ialah deskriptif. Data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang bersifat khusus.³²

³² Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandunng: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Kalālah* dalam Kewarisan Hukum Islam

1. Pengertian *Kalālah*

Kalālah berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf *kaf* dan *lam*. Menurut Ibnu Faris, makna dasar kata ini berkisar pada tiga hal, yaitu: “tumpul (lawan tajam)”, “melingkari sesuatu dengan sesuatu”, dan “salah satu organ tubuh (dada)”. *Pertama*, seperti ungkapan *kalla as-Saifu* yang berarti pedang itu menjadi tumpul. *Kedua kalil* berarti pedang tumpul. *Ketiga* seperti *iklil* yang berarti ikat kepala atau mahkota. Dinamai demikian karena melingkari kepala. Selain tiga makna ini disimpulkannya dari syair *al-A'sya* yang mengatakan *alaitu la urtsi laha min kallin* yang maksudnya “saya jadi tidak meratapinya lagi karena lelah”.³³

Asy-Sya'rabi meriwayatkan bahwa Abu Bakar r.a berkata tentang *kalālah*, maka katakan: “aku menjawab berdasarkan pendapatku, jika benar maka itu dari Allah dan jika salah maka itu dariku. *Kalālah* adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orangtua”. Disaat Umar diangkat menjadi khalifah, beliau berkata: “Sesungguhnya aku malu untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar.”³⁴ Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berkata: Aku adalah orang yang terakhir menjumpai Umar,

³³ Sahabuddin, dkk, ed. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati) cet.I, 2007, h. 422.

³⁴ Damrah Khair, *Masalah Kala>lah*, (Bandarlampung: Anggota IKAPI Gunung Sugihh, 1993) cet. 1, h. 33

sesungguhnya aku mendengarnya berkata: “Pendapat yang kuat adalah pendapat saat ini.” Aku bertanya: “Apa pendapatmu?” Beliau berkata: “*Kalālah* adalah orang yang tidak mempunyai anak dan orangtua (sama dengan pendapat Abu Bakar)

Abu Bakar as-Siddiq mendefinisikan *kalālah* dengan “seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak dan ayah. Pendapat ini kemudian dianut secara luas oleh para ulama tafsir berikutnya, seperti Ibnu Arabi (*mufaasir* dari mazhab Maliki) dan Muhammad Husin Tabataba’i (*mufaasir* Syiah).³⁵ Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa selama beberapa saat masa kekhalifahannya, dalam masalah *kalālah*, ia mengikuti pendapat Abu Bakar. Menurut Umar, *kalālah* adalah mayat yang tidak meninggalkan anak dan ayah. Penafsiran ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Talib dan sejalan pula dengan pengertian yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha yang mengatakan *kalālah* adalah orang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak,³⁶ yaitu tidak mempunyai pokok maupun cabang.³⁷

Secara terminologis seperti diungkapkan oleh az-Zamakhshari dalam tafsirnya, *al-Kasyshaf*, kata *kalālah* mencakup tiga hal, yaitu orang yang mati tanpa meninggalkan anak dan bapak, ahli waris selain anak dan bapak, dan kerabat yang tidak berasal dari jalur anak dan bapak. Kerabat demikian, dinamakan *kalālah* karena pertaliannya dengan pewaris lemah atau tumpul

³⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001) cet. 7, h. 307.

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001) cet. 6, h. 869.

³⁷ Muchamad Ali ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1999) h. 22

(tidak tajam). Atau karena mereka mengelilingi pewaris dari tepian, bukan tengah. seperti ikat kepala yang melingkari tepian kepala sedang tengah-tengahnya kosong.

2. Pengertian Hukum Waris Islam

Menurut bahasa waris disebut dengan *farā'idh* yang kata jamaknya *faridhah* artinya sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang ditetapkan. Sebab, didalam *farā'idh* terdapat pembagian-pembagian yang ditetapkan oleh syara'. *Faraidh* menurut etimologis adalah ketetapan.³⁸

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letter lijk* (*leterleg*) termuat dalam teks-teks ayat suci Al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas waris.³⁹ Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pewarisan menurut sistem kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

Waris berasal dari bahasa Arab *al-Mirats*, dalam bahasa Arab adalah betuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan* yang artinya berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti

³⁸ Mustofa al-Khin dkk, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 841.

³⁹ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam", *Jurnal al-Adalah* Vol. XIII, No 2 (Desember 2016), h. 155.

menggantikan kedudukan, memberi atau mengangrahan, dan menerima warisan.⁴⁰ Kewarisan adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris. Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada oranglain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴¹ Menurut pasal 171 huruf a kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁴²

Mawaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, seperti hubungan hukum dalam keluarga. Dalam redaksi yang lain, Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah berbagai macam persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan orang yang sudah meninggal untuk orang yang masih hidup.

⁴⁰ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 15.

⁴¹ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) , h. 33.

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4.

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *faraidh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), dalam istilah syarak *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraidh*.⁴³ Kewarisan yang sering dikenal dengan istilah *faraidh* ini karena dalam islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.⁴⁴ Seacara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fard* yang berarti *taqdir* atau ketentuan. Dalam istilah syara' bahwa kata *fard* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ahli fikih telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah waris, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya sebagai ilmu mawaris atau ilmu *faraidh*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *faaridi*, *fardii*, *farāidi*, *firrid*.⁴⁵

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut *faraidh*, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.⁴⁶

⁴³ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.27.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 355.

⁴⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 6.

⁴⁶ Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, (Semarang: CV Toha Putra, 2008) h. 513.

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup.⁴⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan. Menurut para ahli di atas warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.⁴⁸ Untuk itu melihat hukum kewarisan Islam diperlukan wawasan kesejaran, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang melingkupi Islam ketika diturunkan.⁴⁹

Hukum kewarisan dapat disimpulkan dari pengertian para ahli di atas bahwa waris adalah berpindahnya harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. Hukum waris juga sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan kehidupan sosial sabagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi

⁴⁷ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: Cahaya Salam, 2011) h. 366.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991) h.11.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 358.

ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.⁵⁰

Harta warisan yang dimaksud dalam hukum waris menurut faqaha adalah harta peninggalan atau segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).⁵¹ Di jelaskan dalam hukum Islam ada beberapa jenis harta peninggalan berupa:

a. Harta Bawaan

Menurut hukum Islam bahwa harta bawaan yakni harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah akan tetap menjadi milik masing-masing walaupun sudah terjadi pernikahan. Sehingga walaupun suami istri di dalam ikatan perkawinan dapat menerima hibah dari seseorang dan benda tersebut tetap menjadi milik suami atau istri yang

⁵⁰ Idris Djakfar, Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 1-2.

⁵¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996) h. 33.

menerimanya, demikian pula mahar tetap menjadi milik mutlak dari istri. Sehingga jika meninggal, benda-benda milik suami atau istri tersebut baik berupa harta bawaan atau benda-benda yang dihibahkan kepadanya menjadi *tirkah* atau harta peninggalan yang dapat diwariskan.⁵²

b. Harta warisan dari pewaris

Harta warisan ini merupakan harta yang diperoleh baik sebelum menikah maupun sudah menikah yang bersumber dari pewaris atau keluarga dari laki-laki maupun perempuan. Harta ini menjadi hak mutlak bagi yang memperoleh harta warisan tersebut. kecuali ada kesepakatan atau kerelaan dari keduanya.

c. Harta Bersama

Harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan demikian jelas istri juga mempunyai saham dalam mengumpulkan harta bersama. Maka ketika suami meninggal istri mempunyai hak atas perkembangan dan hasil dari harta bersama tersebut. Jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi pula antara suami atau istri selama iddah seperti nafkah, makan dan sebagainya. Demikian pula jika suami meninggal dunia maka si istri berhak menerima bagian harta gono gini terlebih dahulu.⁵³

⁵² Moh. Anwar Bc. Hk, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: al-Iklas, 1981) h. 11.

⁵³ Moh. Anwar Bc. Hk, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: al-Iklas, 1981) h. 12.

Pembagian harta waris Islam yang bersumber Al-Qur'an dan Al-Hadits serta kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas, sebab-sebab, rukun dan syarat pembagian harta waris didalamnya yaitu:

a. Asas-asas

- 1) Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁵⁴ Dalam asas *ijbari* hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari pengalihan harta yang pasti terjadi dari setelah seseorang meninggal dunia. hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 7 dan sudah dijelaskan kadarnya yang akan didapat oleh ahli warisnya serta berkewajiban membayar hutang pewarisnya.⁵⁵
- 2) Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak baik dari kerabat keturunan laki-laki maupun perempuan.
- 3) Asas *individual* dalam hukum kewarisan islam adalah diperbolehkannya tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima harta waris yang akan dimiliki oleh masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.⁵⁶

⁵⁴ Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 121.

⁵⁵ Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999) h.5.

⁵⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

- 4) Asas persamaan hak, hukum waris Islam tidak membedakan hak waris untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan.⁵⁷
- 5) Asas keadilan berimbang, adalah keseimbangan antara hak, kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan, kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis keturunan dari ayah.
- 6) Kewarisan semata akibat kematian, hukum waris Islam yang memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan oleh adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih dengan pewarisan apabila masih hidup. Walaupun berhak untuk mengatur harta seorang yang masih hidup, haknya hanya sebatas keperluannya semasa hidup. Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut KUHPerdara. Di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.

b. Sebab-sebab Kewarisan

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: EKONESIA FE UII, 2005) h. 18.

- 1) Kerabat *haqiqi* (ikatan nasab), yaitu ayah, ibu, anak-anak dan saudara-saudara, saudara ayah laki-laki ayah dan lainnya.
- 2) Nikah, yaitu akad perkawinan yang sah antara suami istri, walaupun belum digauli atau belum terjadi khalwat (tinggal berdua). Adapun nikah yang *fasid* atau nikah yang *batil*, maka tidak saling mewarisi antara keduanya.
- 3) *Al-Walaa'*, yaitu kerabat berdasarkan hukum dan dinamakan "*Wala'ul itq* dan *Wala'un ni'mah*". Sebabnya ialah nikmat yang diberikan tuan yang membebaskan budaknya. Apabila tuan membebaskan tuannya maka menghasilkan hubungan dan ikatan yang dinamakan "*Wala'uul itq*."

c. Sebab-sebab terhalangnya waris

Terhalangnya warisan yang dimaksud adalah suatu tindakan atau hal-hal yang menggugurkan hak wewenang untuk mewarisi harta. Berikut yang menjadi penghalang untuk seseorang itu mendapatkan warisan:

- 1) Perbudakan, seorang budak terhalang baginya untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.⁵⁸
- 2) Berbeda agama, dalam arti bila orang yang meninggal beragama Islam yang berhak menjadi ahli warisnya hanyalah orang yang beragama islam. Seseorang yang beragama berbeda tidak berhak mewarisi dan sebaliknya.

⁵⁸ Suhairi, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 39.

- 3) Pembunuhan, yang dimaksud pembunuhan adalah seseorang yang membunuh orang yang berhubungan kewarisan dengannya tidak berhak mewarisi orang yang dibunuhnya. Pembunuhan yang menghilangkan hak kewarisan itu yang disepakati oleh ulama adalah pembunuhan sengaja dalam bentuk pemusnahan.

d. Rukun-rukun Kewarisan

- 1) Pewaris yaitu yang mewariskan yaitu mayit yang hartanya diwarisi oleh oranglain.
- 2) Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dengan sebab hubungan nasab, perkawinan, dan kerabat berdasarkan hukum.
- 3) Yang diwarisi yaitu harta yang ditinggalkan mayit. harta yang diwarisi itu dinamakan *irts*, *turaats* dan *miiraats*.

e. Syarat-syarat Kewarisan

- 1) Wafatnya orang yang mewariskan dengan dibuktikan jasad yang sebenarnya atau secara hukum.
- 2) Kepastian hidup ahli waris ketika wafatnya orang yang mewariskan.
- 3) Mengetahui tentang keadaan ahli waris.⁵⁹

f. Macam-macam ahli waris dan pembagiannya

Dalam pembagian waris Islam menggunakan asas individual yaitu yang dibagi kepada masing-masing yang berhak menerima warisan. Harta waris diberikan kepada ahli waris dengan unsur keluarga, akan tetapi kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan

⁵⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1999) h.31-32.

dan hak-haknya mendapatkan warisan. Kedekatan hubungan keluarga inilah yang menyebabkan terhalangnya waris untuk keluarga yang jauh karena adanya keluarga yang dekat. Ahli waris terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
- 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya, atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris *ashab al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma.

a) Anak perempuan

- (1) Menerima bagian $\frac{1}{2}$ apabila hanya seorang.
- (2) Menerima $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih.
- (3) Menerima sisa apabila bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan menerima separuh bagian laki-laki.

b) Ayah

- (1) Menerima bagian sisa apabila tidak ada *fur'u waris* (anak atau cucu).

- (2) Menerima $\frac{1}{6}$ apabila bersama anak laki-laki dan atau bersama anak perempuan.
- (3) Menerima $\frac{1}{6}$ tambah sisa apa bila bersama anak perempuan saja.
- (4) Menerima $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah).

c) Ibu

- (1) Menerima $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
- (2) Menerima $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.
- (3) Menerima $\frac{1}{6}$ apabila ada anak atau dua orang saudara lebih.

d) Saudara perempuan seibu

- (1) Menerima $\frac{1}{3}$ apabila dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- (2) Menerima $\frac{1}{6}$ apabila seorang saja, tidak bersama anak dan ayah.

e) Saudara perempuan sekandung

- (1) Menerima $\frac{1}{2}$ apa bila seorang, tidak bersama anak dan ayah.
- (2) Menerima $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

f) Saudara perempuan seayah

- (1) Menerima $\frac{1}{2}$ apabila satu orang, tidak dengan anak dan ayah.

- (2) Menerima $\frac{2}{3}$ apabila dua atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
 - (3) Menerima sisa apabila bersama saudara laki-laki seayah dengan ketuntuan separuh dari bagian laki-laki.
 - (4) Menerima $\frac{1}{6}$ apabila bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-tsulutsain*).
 - (5) Menerima sisa (*ashabah ma'al ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- 2) Ahli waris *ashabah* (yang mendapatkan semua harta). *Ashabah* dalam bahasa Arab adalah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat bahwa mereka berhak mendapat warisan. Ahli waris yang berhak dalam kedudukan sebagai *ashabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan dalam *dzawil furudh*. Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu semua diserahkan kepada *ashabah*. Akan tetapi, apabila ada antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *ashabah*.⁶⁰ Macam-macam ahli waris *ashabah* terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:
- a) *Ashabah bin nafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. Dalam kelompok ahli waris ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqab* (orang laki-laki atau

⁶⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 38

perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), berikut daftar ahli warisnya:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Kakek dari garis ayah
- (5) Saudara laki-laki sekandung
- (6) Saudara laki-laki
- (7) Anak laki-laki saudara seayah
- (8) Paman sekandung
- (9) Paman seayah
- (10) Anak laki-laki sekandung
- (11) Anak laki-laki paman seayah
- (12) *Mu'tiq* atau *mu'tiqab* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).⁶¹

b) *Ashabah bil al-ghair* ialah bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia kembali menerima bagian tertentu. Dalam penerimaan *Ashabah bil al-ghair* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari bagian perempuan, adapun bagian *Ashabah bil al-ghair* adalah sebagai berikut:

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73-74

- (1) Anak perempuan bersama anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama garis laki-laki
- (3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
- (4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

c) *Ashabah ma'al ghairi* ialah ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian *Ashabah ma'al ghairi* adalah sebagai berikut:

- (1) Saudara perempuan sekandung, apabila ahli waris saudara perempuan sekandungnya seorang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih atau perempuan sekandung dan cucu perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghairi*, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
- (2) Saudara perempuan seapak, apabila seorang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi *ashabal ma'al ghairi*. Dan perlu diingat bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabal ma'al ghairi*, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi jika mempunyai saudara laki-laki maka statusnya

atau kedudukannya berubah menjadi *ashabah bil ghairi* (saudara seapak menjadi *ashabah* karena ada saudara laki-laki)

- (3) Ahli waris *dzawi arham* ialah orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan (*bint*).

g. Manfaat dalam Waris Islam

Manfaat atau hikmah menerapkan mawaris ini juga untuk pedoman manusia. Hikmah melaksanakan mawaris antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Menerapkan mawaris ini berarti kita taat kepada pedoman Allah SWT dan dinilai ibadah.
- 2) Untuk menegakkan keadilan. Dengan menerapkan mawaris, berarti kita menegakkan keadilan. Adil di dalam Islam tidak sama dengan sama rata dan sama rasa. Banyak dan sedikitnya bagian ahli waris itu disesuaikan dengan tanggung jawabnya dalam hal menanggung nafkah dan kedekatan kekerabatannya terhadap pewaris.
- 3) Untuk tetap mengharmoniskan hubungan dengan kerabat. Apabila semua ahli waris menyadari aturannya, dengan pembagian warisan menggunakan hukum akan membuat hubungan mereka tetap harmonis. Namun, jika tidak menggunakan hukum mawaris ini,

kemungkinan akan timbul monopoli. Akibatnya, perpecahan diantara kerabat itu tidak dapat dihindari.

- 4) Untuk mensejahterakan keluarga yang ditinggal. Dengan menggunakan hukum waris Islam, pembagian anak lebih besar dari pada keluarga yang lebih jauh. Ini dimaksudkan agar keturunan yang ditinggalkan itu tidak hidup dalam kesengsaraan.
- 5) Untuk kemaslahatan bersama.
- 6) Mengangkat martabat dan hak kaum wanita sebagai ahli waris.
- 7) Menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian waris.
- 8) Menghindari timbulnya fitnah karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta waris yang tidak benar.
- 9) Dapat mewujudkan keadilan dalam keluarga yang kemudian berdampak positif bagi pandangan masyarakat.
- 10) Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya.
- 11) Menjunjung tinggi hukum Allah.⁶²

3. *Kalālah* dalam Kewarisan Hukum Islam

Sebagian ulama berkata bahwa *kalālah* adalah orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orangtua. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan fuqaha sependapat bahwa yang

⁶² Muhibin, Muhammad, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009) h. 45.

dimaksud dengan *kalālah* ialah tiadanya empat golongan keluarga yang telah disebutkan yaitu ayah, kakek, anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Mazhab Syafi'i *kalālah* adalah keadaan seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah sampai derajat yang rendah asal masih garis laki-laki. Pengertian ini tampak pengaruh patrilineal pada penyempitan arti walad tersebut yaitu hanya anak laki-laki atau keturunan garis laki-laki. Dan apabila ada hanya anak perempuan atau cucu perempuan (bukan garis laki-laki), maka peristiwa kewarisan *kalālah* itu belum terjadi.⁶³

Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah (ahli hukum Islam Indonesia) mempunyai pandangan yang berbeda dengan para sahabat dan mayoritas ulama yang disebut diatas. Menurutnya, *kalālah* ialah orang yang mati tidak meninggalkan anak. Ayah ikut bersama saudara berbagi harta warisan orang yang meninggal.⁶⁴ Ketika Umar bertanya kepada baginda Rasulullah tentang makna *kalālah*, yang kemudian Nabi tidak menjawabnya. Bahkab menyuruh Umar untuk mengkajinya sendiri dari ayat tentang *kalālah*, padahal Umar adalah seorang ahli dalam masalah linguistik, yang tidak mungkin ia tidak tau arti harfiyah *kalālah*, maka dari situ dapat disimpulkan, bahwa istilah *kalālah* tidaklah bisa dipahami dari bahasa, karena istilah ini bagian dari ayat yang *mutasyabihat* (tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah),

⁶³ Damrah Khair, *Masalah Kala>lah* (Bandar Lampung: Anggota IKAPI Gunung Sugih, 1993) cet. 1, h. 36.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001) cet. 6, h. 869.

yang untuk memahaminya, Allah telah memberikan kepada kita untuk mengartikannya secara hukmiyah (tidak bisa menentukan kebenarannya dengan kaidah). Oleh karena itu Nabi tidak menjawab pertanyaan Umar, bahkan beliau menyuruh Umar untuk berijtihad sendiri dan karena pertanyaan yang diajukan Umar adalah untuk mencari tahu saja, maka Nabi memberi keleluasaan kepada Umar untuk berijtihad sendiri dalam memahami ayat warisan.⁶⁵ Penggunaan istilah *kalālah* dapat digunakan untuk pewaris maupun ahli waris. Ada beberapa pendapat ahli bahasa tentang pewaris yang *kalālah*, yaitu orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua, orang yang tidak mempunyai keluarga dan kerabat, orang yang meninggal, dan orang yang tidak mempunyai anak, orangtua dan saudara.⁶⁶

Ibnal Arabi menyatakan bahwa *kalālah* adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki serta meninggalkan saudara. *Kalālah* adalah nama yang ditetapkan secara bahasa. Diantara makna *kalālah* yang ditetapkan secara bahasa itu salah satunya dipakai untuk pengertian secara syara'. QS. an-Nisa [4]: 176 menamakan pewaris dengan *kalālah* dan menyebutkan bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris

Dalam pembagian harta waris *kalālah* Mazhab Syafi'i memberikan beberapa contoh kasus berikut ini:

⁶⁵ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2005) cet. 1, h. 343-344.

⁶⁶ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1998) h. 448.

- a. Seorang suami mati dengan meninggalkan ahli waris seorang istri (janda), seorang ibu, dua anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki sekandung.

Kasus tersebut adalah *kalālah* karena pewaris tidak menurunkan anak/cucu laki-laki. Adapun bagiannya seorang istri mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ (karena ada anak sesuai dengan QS. an-Nisa;12), seorang ibu mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ (karena ada anak, QS. an-Nisa; 11) dan dua orang anak perempuan berbagi sama rata sebanyak $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$ (QS. an-Nisa; 11), sedangkan saudara laki-laki memperoleh *ashabah* yaitu $\frac{1}{24}$. (penafsiran QS. an-Nisa; 176)

- b. Seorang pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang istri, dua orang cucu perempuan dari anak perempuan, seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki sekandung.

Menurut Mazhab Syafi'i hal itu telah terjadi *kalālah* dan bagiannya seorang istri $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ (karena ada keturunan, sesuai dengan QS. an-Nisa; 12), ibu $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ (karena ada anak sesuai QS. an-Nisa; 11) sedangkan dua orang cucu perempuan dari anak perempuan adalah nihil, dua orang saudara laki-laki adalah *ashabah* = $\frac{17}{24}$ (QS. an-Nisa; 176).

- c. Seorang suami meninggal dengan tidak berketurunan, sedangkan ia meninggalkan seorang istri (janda) dan dua orang saudara seibu. Hal ini menurut Mazhab Syafi'i telah terjadi *kalālah* dan bagiannya adalah istri $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ (QS. an-Nisa; 12), dua saudara seibu $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ (QS. an-

Nisa; 12) masih ada sisa bagi sebesar $\frac{5}{12}$ yang harus *diraddkan* kepada dua orang saudara seibu sehingga menjadi $\frac{9}{12}$.

- d. Seorang istri mati dengan tidak berketurunan, meninggalkan ahli waris suami, tiga orang saudara sekandung, seorang ayah dan seorang ibu. Menurut Mazhab Syafi'i hal ini belum terjadi *kalālah* karena ayah masih hidup dan pembagiannya suami $\frac{1}{2}$ (karena tidak mempunyai anak sesuai QS. an-Nisa; 12) tiga rang saudara sekandung nihil, karena *mahjub* oleh ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{2}$ dengan perincian ayah $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$ (sebagai *ashabah*) dan ibu $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ (ibu $\frac{1}{3}$ dari sisa harta).
- e. Seorang suami mati dengan tidak berketurunan, tetapi meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki dan perempuan. Menurut Mazhab Syafi'i keadaan tersebut telah terjadi *kalālah* karena tidak ada anak laki-laki dan ayah, dan pembagiannya istri $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ (QS. an-Nisa; 12), ibu $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ (QS. an-Nisa; 11) dan dua orang saudara memperoleh $\frac{7}{12}$ (saudara laki-laki $\frac{2}{3} \times \frac{7}{12} = \frac{14}{36}$ saudara perempuan $\frac{1}{3} \times \frac{7}{12} = \frac{7}{36}$) hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa; 176.⁶⁷

B. Hukum Waris *Kalālah* dalam Kewarisan Istri

1. Pengertian Waris Istri

Waris istri adalah hak-hak waris yang wajib ditunaikan setelah suami meninggal dan akan diterima oleh seorang istri setelah suaminya meninggal dunia. Kedudukan istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, patut

⁶⁷ Damrah Khair, *masalah kala>lah*, (Bandarlampung: Anggota IKAPI Gunung Sugihh, 1993) cet. 1, h. 25.

mendapat perhatian serta diperlukan secara hukum dalam lingkungan hukum.⁶⁸ Dalam kewarisan istri memiliki syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, antara lain masih dalam hubungan pernikahan yang sah.

Pernikahan adalah kumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam sebuah ikatan yang sah.⁶⁹ Nikah menurut bahasa ialah *al-Jam'u* dan *al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah dapat diartikan dengan *aqdu al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Dapat pula diartikan dengan menyetubuhi istri. Dalam hubungan pernikahan yang sah dapat menyebabkan hukum yang secara lahir dan batin dijalankan dengan seksama hingga salah satu dari suami atau istri meninggal dan menyebabkan kewarisan.

Di Indonesia hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ

⁶⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (jakarta: PT RIEKA CIPTA 2006) cet.4, h. 30.

⁶⁹ Rezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018) h. 43.

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressido, 2007) h. 155.

وَلَهُنَّ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ
 رَجُلٌ يُّورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa suami dan istri saling mewarisi, serta keturunannya berhak mendapatkan warisan sesuai pembagiannya masing-masing yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat Islam. Dalam hukum suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat⁷¹.

a. Perkawinan yang sah menurut syariat Islam.

⁷¹ Amin husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahij dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 75-76.

- b. Masih terikat hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan masih berlangsung samapi saat kematian salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai. Termasuk masih dalam keadaan talaq yang masa *iddahnya* belum berakhir, maka suami atau istri yang masih hidup berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi, apabila salah satu dari mereka meninggal dalam keadaan sudah berakhirnya masa *iddah*, maka masing-masing tidak dapat saling mewarisi.

Hadis yang berkaitan dengan pembagian waris:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَحْلٍ ذَكَرٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Serahkanlah warisan-warisan itu kepada ahlinya, adapun sisanya, bagi ahli waris laki-laki yang terdekat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih No. 906).⁷²

Hadis di atas menjelaskan mengenai pembagian warisan bagi ahli waris yang terdekat, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Dalam pembagiannya Al-Qur’an dan as-Sunnah telah memberikan tata cara dan pembagian yang telah ditentukan kadarnya kepada masing-masing sebagai ahli waris yang ditinggalkan.

2. Dasar Hukum Waris *Kalālah* dalam Kewarisan Istri

Dasar hukum waris *kalālah* dijelaskan dalam Al-Qur’an, kata *kalālah* muncul dua kali dan semuanya dalam surah an-Nisa.

Pertama, *kalālah* QS. An-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ^ج وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ^ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ^ج وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج

⁷² Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulughul Mahram*, terjemahan Muh. Syarief Sukandy (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1986), h. 348.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun” (QS. An-Nisa [4]: 12).⁷³

Kedua, QS. An-Nisa ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga

⁷³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa (4): 12, (CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 79.

dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. an-Nisa [4]: 176).⁷⁴

Ketiga, hadis Nabi.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَحْلٍ ذَكَرٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Serahkanlah warisan-warisan itu kepada ahlinya, adapun sisanya, bagi ahli waris laki-laki yang terdekat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih No. 906).⁷⁵

3. Sistem Waris *Kalālah* dalam Kewarisan Istri

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang pada akhirnya akan mengalami akibat hukum dari peristiwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang suami akan diminta atau secara naluriah memberikan hak dan kewajiban kepada istri, dan sebaliknya. Perkawinan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh *syara*.⁷⁶ Sistem waris *kalālah* dalam kewarisan Istri ini telah diatur dan dijelaskan secara jelas dalam sumber Al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam pelaksanaan kewarisan ini terdapat syarat-syarat pelaksanaan hukum kewarisan Islam, sebagai berikut:

- a. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.
- b. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 106.

⁷⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulughul Mahram*, terjemahan Muh. Syarief Sukandy (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1986), h. 348.

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 12.

c. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan dalam hukum Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum islam, berarti hukum kewarisan bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.⁷⁷ Maka perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Perkawinan dapat putus karena sebab kematian, perceraia, dan atas keputusan pengadilan yang telah diatur dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷⁸ Meninggal atau mati disini meliputi baik fisik yang diketahui jenazahnya, maupun kematian secara yuridis yaitu dalam kondisi suami yang *mafqud* (tidak diketahui dia masih hidup atau

⁷⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.2, 2007), h. 113.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 108.

sudah mati).⁷⁹ Sebab kematian inilah yang menyebabkan terjadinya pewarisan. Dalam hukum perdata berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Indonesia memiliki hukum perdata dalam menyelesaikan masalah waris baik untuk yang muslim maupun non-muslim. Hukum waris perdata mengandung tiga unsur pokok dalam pewarisan,⁸⁰ yaitu :

a. Orang yang meninggalkan harta warisan (*elflater*)

Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta warisan dan ahli waris. Unsur meninggalnya anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.⁸¹

b. Harta warisan (*erfernus*)

Harta waris menurut perdata yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Dalam hukum perdata mengandung adanya asas persatuan bulat yaitu suatu asas dimana

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 248.

⁸⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1977), h. 79.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. Revisi: Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) h. 201.

antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya, hal ini berdasarkan pasal 119 KUHPdata.

c. Ahli waris (*erfergenaam*)

Ahli waris adalah orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang dan testament berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia.⁸²

Sistem kewarisan menurut Islam adalah sistem yang menggunakan asas Individual yang pewarisan ahli warisnya memperoleh perseorangan harta peninggalan dengan cara membagi-bagikan pemilikan harta itu diantara mereka.⁸³ Artinya satriap ahli waris memperoleh warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan kadarnya yang telah ditentukan pembagiannya warisnya. Berikut sitem pembagian waris *kalālah* dalam kewarisan istri menurut Al-Qur'an.

Seorang istri mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) harta. yaitu istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tidak mempunyai anak atau keturunan (*kalālah*). "*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.*" (QS. an-Nisa (4) : 12). Dengan Demikian firman Allah tersebut juga menegaskan, bahwa jika istri seorang yang ditinggal meninggal oleh suaminya makanya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari hartnya.

⁸² Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris menurut KUHPdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 55.

⁸³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan al-Hadits*, (Timtamas: Jakarta, 1998) h. 16.

Berikut contoh dan cara pembagian waris *kalālah* dalam kewarisan istri menurut Damrah Khair dalam bukunya yang berjudul “Masalah *kalālah*”:

1. Seorang suami meninggal dengan tidak berketurunan, sedangkan ia meninggalkan seorang istri (janda) dan dua orang saudara seibu. Hal ini menurut Mazhab Syafi’i telah terjadi *kalālah* dan pembagiannya adalah istri $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ (QS. an-Nisa; 12), dua saudara seibu $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ (QS. an-Nisa; 12) masih ada sisa bagi sebesar $\frac{5}{12}$ yang harus diraddkan kepada dua orang saudara seibu sehingga menjadi $\frac{9}{12}$.
2. Seorang suami mati dengan tidak berketurunan, tetapi meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki dan perempuan. Menurut Mazhab Syafi’i keadaan tersebut telah terjadi *kalālah* karena tidak ada anak laki-laki dan ayah, dan pembagiannya istri $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ (QS. an-Nisa; 12), ibu $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ (QS. an-Nisa; 11) dan dua orang saudara memperoleh $\frac{7}{12}$ (saudara laki-laki $\frac{2}{3} \times \frac{7}{12} = \frac{14}{36}$ saudara perempuan $\frac{1}{3} \times \frac{7}{12} = \frac{7}{36}$) hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa; 176.⁸⁴

C. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah mengkaji dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis temukan, kajian ilmiah yang penulis kaji belum ditemukan judul yang secara spesifik sama, yaitu implementasi konsep *kalālah* dalam kewarisan istri pada masyarakat muslim. Dalam tinjauan pustaka yang terdahulu penulis

⁸⁴ Damrah Khair, *masalah kala>lah* , (Bandarlampung: Anggota IKAPI Gunung Sugihh, 1993) cet. 1, h. 25.

menganalisa beberapa karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal yang masih ada kaitannya dengan karya ilmiah yang penulis kaji, diantaranya adalah:

1. Evra Willya, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado tahun 2014 dengan judul “*Konsep Kalālah Dalam Al-Qur’an dan Penafsirannya Menurut Suni dan Syiah Imamiyyah*”. Jurnal ini menjelaskan tentang makna *walad* dalam kewarisan *kalālah* yang terdapat dalam Al-Qur’an. Para *mufassir* berbeda pendapat tentang makna *Walad* dalam kewarisan *kalālah*, *walad* dalam kewarisan *kalālah* berpengaruh terhadap kewarisan saudara. Dalam karya ini makna *walad* diuraikan secara kritis, komprehensif, dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian *walad* dilihat dari perspektif ulama Suni dan *Syiah Imamiyyah*.
2. Putri Ajeng Fatimah, Skripsi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul “*Waris Kalālah dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir QS. an-Nisa [4] ayat 12 dan 176)*”. Skripsi ini membahas tentang kedua ayat dalam surah an-Nisa [4] ayat 12 dan 176, didalamnya terbukti adanya perbedaan makna *kalālah* diantara para ulama atau *mufassir* dengan Wahbah az-Zuhaily, yakni mendefinisikan sebagai orang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan orangtua, seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, ataupun seorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak saja. Adapun menurut Wahbah Zuhaily memiliki persamaan dengan *mufassir* lainnya. Hanya saja terdapat penambahan dalam setiap pembagiannya. Dengan demikian yang

disebut sebagai *kalālah* adalah saudara laki-laki maupun perempuan sebagai posisi seorang yang menjadi pewaris.

Dari karya ilmiah di atas yang menganalisis tentang *kalālah*, memiliki karakteristik serta menonjolkan teoritis dan ilmiah yang sesuai dengan kajiannya. Namun dalam kajian di atas sekiranya belum ada yang membahas mengenai “*Implementasi Konsep Kalālah Dalam Kewarisan Istri pada Masyarakat Muslim*”.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Assaad Yunus. *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*, PT. al-Qushwa, Jakarta 1992.
- Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*. Alaudin Press, Makasar 2013.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta 2001.
- Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, EKONESIA FE UII, Yogyakarta 2005.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta 2012
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressido, Jakarta 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta 2000.
- Al-Albaghdadi, al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, Dar al-Fikr, Bayrut 1998.
- Ali ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta 1996.
- Ali ash-Shabuni Muhammad, *Ilmu Hukum Waris*, Mutiara Ilmu, Surabaya 1999.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulughul Mahram*, terjemahan Muh. Syarief Sukandy, PT. al-Ma'arif, Bandung 1986.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta 2008.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 1991.
- Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Panji Pustaka, Yogyakarta 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2013.
- Damrah Khair, *Masalah Kalālah*, Anggota IKAPI Gunung Sugihh, Bandarlampung, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Cetakan ke-10 CV. Penerbit Dipnegoro, Jakarta 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi ke-5, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Rafika Adi Tama, Bandung 2007.

Habiburrahman *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2011.

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta 2001.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan al-Hadits*, Jakarta, Timtamas 1998.

Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Bayrut 1998.

Idris Djakfar, Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta 1995.

John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fisafat*, Paradigma, Yogyakarta 2005

Katsir, Ibnu, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Gema Insani, Depok 2017.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung 1996

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung 1996.

Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandunng 2004.

M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta 1994.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

- Moh. Anwar Bc. Hk, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, al-Iklas, Surabaya 1981.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor 2011.
- Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, CV Toha Putra, Semarang 2008.
- Muhibin, Muhammad, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika Jakarta 2009.
- Muhammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, Yama Widya, Bandung 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bhakti, Bandung 2004.
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, Khalifa, Jakarta 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, Dar al-Kitab al-Arabi, Mesir 1959.
- Mustofa al-Khin dkk, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'I*, PT. Raja Granfindo, Jakarta 2002.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT RIEKA CIPTA, Jakarta 2006.
- Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1999.
- Rezim Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Laksana, Yogyakarta 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1977.
- Sahabuddin, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta 2007.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offsets, Yogyakarta 2009.

Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam", *Jurnal al-'Adalah* Vol. XIII, No 2 Desember 2016.

Suhairi, *Hukum Kewarisan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 1991.

Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Cet-10, Jakarta 1997.

Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris menurut KUHPerdara (BW)*, Darul Ulum Press, Serang 1993

Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015.

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor 2011.

Tengku Muhammad Habsi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang 2001.

Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Citra Risalah, Yogyakarta 2012.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang 1997.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta Timur 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1991.

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Tehnik*, Mizan, Bandung 1990.

Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, Dar al-Kitab al-Arabi, Mesir 1959.

Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.